



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : MARDHIYAH NUR
- Jabatan** : PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN
- NHK** : 269249

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/130 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

- MOBIL, SUZUKI AV11414FSDX (4X2) MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOTOR, HONDA NF 11B1DMT Tahun 2010, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000
- MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOTOR, HONDA E1FO2N11M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 430.000.000

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 380.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MARDHIYAH NUR
NIK : 3401075103690003
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 8 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.